

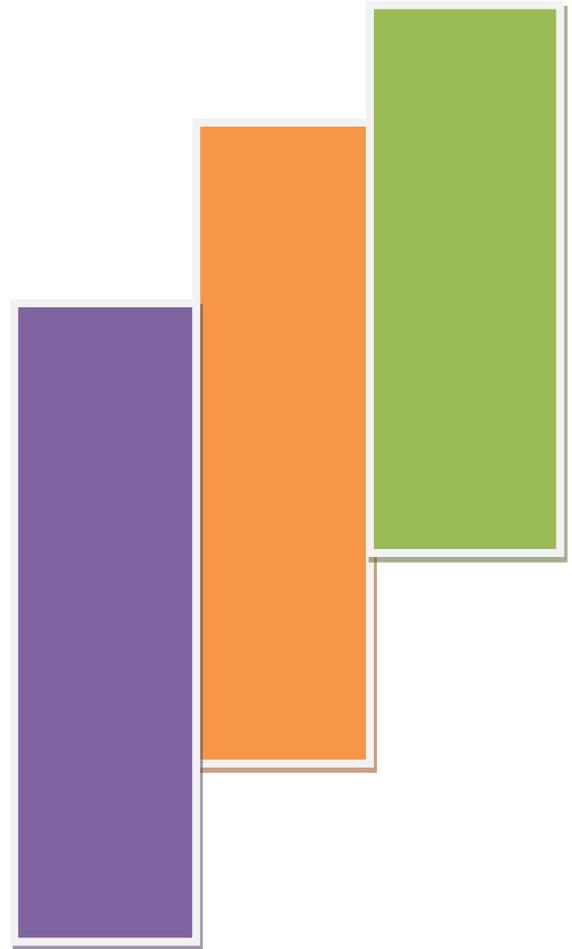


**SATPOL PP TAHUN 2022**

Dokumen Perencanaan Tahunan

# RENJA TA.2022

**RENCANA KERJA  
SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA  
TAHUN ANGGARAN  
2022**



## DAFTAR ISI

	Halaman
Daftar Isi .....	1
Kata Pengantar .....	2
BABI PENDAHULUAN .....	3
1.1 Latar Belakang .....	3
1.2 Landasan Hukum .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan .....	4
1.4 Sistematika Penulisan .....	4
BABII HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU .....	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah .....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....	10
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah .....	10
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD .....	11
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....	13
BABIII TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....	14
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	14
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah .....	14
3.3 Program dan Kegiatan .....	15
BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....	17
BABV PENUTUP .....	20

## KATAPENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas petunjuk dan Rahmat-Nya sehingga dokumen Rencana Kerja (RENJA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2022 dapat di selesaikan dengan baik.

Kami menyadari dalam penyusunan dokumen ini banyak terdapat kelemahan dan kekurangan,oleh karenanya kami berharap saran serta masukan dari semua pihak sehingga dokumen Rencana Kerja ini akan lebih baik dan terarah.

Demikian dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat untuk menjadi bahan serta bermanfaat bagi kita semua.

Paringin, 11 Mei 2022

	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
	<i>[Handwritten Signature]</i>
	NOOR ASPARIAH, SP. MP
	NIP. 19660613 199802 2 003

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 merupakan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun yang telah tertuang pada rencana strategis dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran menitik beratkan pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana Kerja Tahun 2023 juga dirumus untuk mensinkron dalam rangka menunjang visi, misi kepala daerah pada tahun 2023 dengan program dan kegiatan yang mengakomodir urusan pelayanan dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2023, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2023 dengan memperhatikan program prioritas Pemerintah Daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan pemerintah daerah pada tahun 2023.

### **1.2 Landasan hukum**

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tim Kewaspadaan Dini di Daerah.

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan nomor 18);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2026;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **a. Maksud**

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan di susun dalam rangka meningkatkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam upaya mendukung visi dan misi kepala daerah tahun 2023

#### **b. Tujuan**

Tujuan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 untuk terselenggaranya tugas pokok dan fungsi serta tercapai sasaran pembangunan pemerintah Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan Rencana Kerja Satpol PP Kabupaten Balangan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini di jelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Satpol pp

#### **BAB II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA Satpol pp TAHUN 2022**

Bab ini memuat review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2021 dan perkiraan capaian tahun 2022 mengacu pada APBD tahun 2021

		dikaitkan dengan pencapaian rencana strategis. rencana strategis, analisa kinerja, isu-isu penting penyelenggaraan dan fungsi SKPD, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB	III.	TUJUAN DAN SASARAN Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran
BAB	IV.	Renja Bappeda, serta program dan kegiatan RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB	V	Memuat tentang uraian program dan kegiatan beserta pendanaannya. PENUTUP Berisi tentang catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak Lanjut

## BAB II

### EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU

#### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Berdasar dengan tugas pokok dan fungsi, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2021 yang berorientasi pada Urusan Wajib Pelayanan Dasar ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan meningkatkan penanganan kantrantibmas, dengan target capaian renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan tahun 2022 adalah 123,23%.

Pelaksanaan program pada tahun 2021 berdasarkan target yang ingin capai, yaitu 30 Kasus Pelanggaran Tranntibmas dan di dalam pelaksanaannya angka pelanggaran tersebut dapat di tekan menjadi 23 kasus pelanggaran, hal tersebut di peroleh dengan upaya melakukan deteksi dini yang terdiri dari unsur masyarakat masyarakat dan pihak vertikal dengan hubungan koordinasi dan informasi melalui program Pemeliharaan Kantrantibmas dan PencegahanTindak Kriminal.

Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 sudah berjalan sebagaimana mestinya dengan yang di diharapkan.Untuk lebih meningkat pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang pada rencana kerja pada tahun 2021 untuk lebih akurasi terhadap koordinasi dan informasi upaya deteksi dini berbagai permasalahan di Kabupaten Balangan perlu menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran yang diharapkan sebagai tindak lanjut, perlu dilkukakan evaluasi dari hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2021 yaitu berupa :

1. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait kebutuhan pagu anggaran tahun selanjutnya.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi lebih intens kepada pihak vertikal dan forum-forum yang ada untuk saling berbagi informasi terkaitkan trantibmas.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP di Tahun 2022 dan Capaian Terhadap Renstra Perangkat Daerah Dapat di Lihat Pada Tabel Berikut :

No.	Kode Rekening			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Tahun 2026 Akhir Periode Renstra		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Tahun 2021				Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra sampai Dengan Tahun 2021		
										Target SKPD Tahun 2021	Realisasi Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2021		Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra		
No.	1			2	3	4		5		6		7		8	9	10=(5+7+9)	11 = (10/4)*100
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
1	05			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT													
1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja (Nilai Sakib)	78,20	Angka/Nilai	70,40	Angka Nilai	70,40	Angka Nilai	70,40	Angka Nilai	100%	70,40		
1	05	01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100%	100%		
1	05	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat	3	111.480.000	3	89.375.000	3	111.480.000	3	89.375.000	100%	3	9	300
1	05	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	5.200.000	1	4.480.000	1	5.200.000	1	4.480.000	100%	1	3	300
1	05	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Lancarnya Keuangan Perangkat Daerah	1	Tahun	100	Persen	1	Tahun	100	Persen	100%	100%		
1	05	01	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan AS	12	4.095.033.600	12	3.948.433.067	12	4.095.033.600	12	3.948.433.067	100%	12	36	300
1	05	01		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Lancarnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	12	Bulan	100	Persen	12	Bulan	100	Persen	100%	100%		
1	05	01	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan berdasarkan tugas dan fungsi	20	161.705.300	20	121.789.500	20	161.705.300	20	121.789.500	100%	20	60	300
1	05	01	11	Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bimbingan Teknis yang diikuti	20	42.320.000	20	31.247.500	20	42.320.000	20	31.247.500	100%	20	60	300

1	05	01		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12	Bulan	100	Persen	12	Bulan	100	Persen	100%	100%		
1	05	01	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12	90.936.800	12	76.976.600	12	90.936.800	12	76.976.600	100%	12	36	300
1	05	01	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Bulan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12	32.520.400	12	29.677.500	12	32.520.400	12	29.677.500	100%	12	36	300
1	05	01	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	7.200.000	12	5.000.000	12	7.200.000	12	5.000.000	100%	12	36	300
1	05	01	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang diikuti	21	150.692.000	12	140.270.900	12	150.692.000	12	140.270.900	100%	12	36	300
1	05	01		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Barang Milik Daerah yang disediakan	12	Bulan	66,67%	Persen	12	Bulan	66,67%	Persen	66,67%	100%		
1	05	01	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	5	200.000.000	5	114.300.000	5	200.000.000	3	114.300.000	60	5	12	240
1	05	01	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	1	8.500.000	1	5.950.000	1	8.500.000	1	5.950.000	100	1	3	300
1	05	01	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	3	87.500.000	3	59.725.000	3	87.500.000	2	59.725.000	66,7	3	8	266,67
1	05	01		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya	12	Bulan	100	Persen	12	Bulan	100	Persen	100%	100%		
1	05	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	91.800.000	12	76.191.189	12	91.800.000	12	76.191.189	100%	12	36	300
1	05	01		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	Bulan	100	Persen	12	Bulan	100	Persen	100%	100%		
1	05	01	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	12	250.850.000	12	247.480.550	12	250.850.000	12	247.480.550	100%	12	36	300
1	05	01	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12	9.750.000	12	8.085.000	12	9.750.000	12	8.085.000	100%	12	36	300
1	05	01	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	12	15.951.200	12	13.180.200	12	15.951.200	12	13.180.200	100%	12	36	300

1	05	02		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14	Angka pelanggaran	23	Angka Pelanggaran	30	Angka Pelanggaran	23	Angka Pelanggaran	123,23%	30 Angka pelanggaran		
1	05	02		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	14	Angka Pelanggaran	23	Angka Pelanggaran	30	Angka Pelanggaran	23	Angka Pelanggaran	123,23%	30 Angka pelanggaran		
1	05	02	01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini	Jumlah Kegiatan Pencegahan Gangguan Keamanan dan Ketertiban	750	2.086.386.000	750	1.902.996.400	750	2.086.386.000	750	1.902.996.400	100%	750	2250	300
1	05	02	04	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat yang dibina	2355	55.955.000	2355	44.448.000	2355	55.955.000	2355	44.448.000	100%	2355	7065	300
1	05	02	07	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan	Jumlah MoU antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan	4	1.826.300.000	4	1.710.656.000	4	1.826.300.000	4	1.710.656.000	100%	4	12	300
1	05	02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Perda yang dijalankan	24	Perda	24	Perda	24	Perda	24	Perda	100%	24 Perda		
1	05	02	01	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	8	132.766.000	8	105.844.000	8	132.766.000	8	105.844.000	100%	8	24	
1	05	02	02	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang Diawasi	24	389.400.000	24	368.100.000	24	389.400.000	24	368.100.000	100%	24	72	

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Analisis kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja mengacu sasaran Strategis yaitu MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, hal tersebut dalam Pelaksanaannya juga dijadikan sebagai indikator utama pada Satuan Polisi Pamong Praja, hal tersebut Dapat dilihat dalam table berikut:

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2023 (n)	Tahun 2024 (n+1)	Tahun 2021 (n-2)	Tahun 2022 (n-1)	Tahun 2022 (n)	Tahun 2023 (n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Angka Pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat		Meningkatnya keamanan dan ketertiban Masyarakat	30	25	22	20	23	16	25	22	

Sasaran :MENINGKATNYA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT

### 2.3 Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

- Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban secara berencana, bertahap dan terus menerus, dipacu dengan bidang bidang lainnya, karena dengan suasana yang tentram dan tertib maka masyarakat akan bergairah untuk mentaati Peraturan perundang–undangan yang berlaku
- Upaya – upaya yang di lakukan adalah melalui pembinaan, pengawasan, penertiban dan penindakan sehingga terjadi peningkatan kesadaran masyarakat untuk mentaati Peraturan Perundang – Undanguan yang berlaku.
- Dalam pencapaian suasana tentram dan tertib di masyarakat ada beberapakendala antara lain:
  - a. Peran serta dan pemberdayaan masyarakat perlu dioptimalkan termasuk lembaga adat guna terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Balangan.
  - b. Masih adanya pelanggaran di fasilitas umum dan fasilitas sosial terutama pedagang kaki lima, pedagang asongan, pedagang bermobil, Warung remang remang, gepeng, WTS/Waria, kelompok funk, sehingga dapat berpotensi terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Balangan.
  - c. Fungsi pembinaan dan pemberdayagunaan masyarakat terutama lembaga – lembaga adat belum mendukung ketentraman dan ketertiban secara optimal
  - d. Adanya wabah Covid 19 yang sangat berdampak terhadap kehidupan bermasyarakat, baik disektor ekonomi maupun social, sehingga dapat berpotensi terganggunya ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Balangan.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Balangan tahun 2022 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2022 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2022 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Balangan.

Pada tahun 2022 program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan yang tertuang dalam rencana kerja tahun 2022 akan di sinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Balangan sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitif untuk di jadikan rencana kerja tahun 2022.

Berikut ini adalah tabel review rancangan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2022.

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kabupaten Balangan				URUSAN PEMERINTAH WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Kabupaten Balangan				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Balangan			10.626.989.489	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Kabupaten Balangan			13.806.394.989	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kabupaten Balangan			6.562.164.489	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Kabupaten Balangan			6.562.164.489	
	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kabupaten Balangan	Persentase Fasilitasi Dukumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	218.246.200	PERENCANAAN PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	Kabupaten Balangan	Persentase Fasilitasi Dukumen Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	218.246.200	
	Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dukumen	150.755.000	Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah Dukumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dukumen	150.755.000	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20671200	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	20671200	
	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	46.820.000	Evaluasi dan Kinerja Perangkat daerah	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	46.820.000	
	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Kabupaten Balangan	Persentase Fasilitasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.929.856.889	ADMINISTRASI KEUANGAN DAN PERANGKAT DAERAH	Kabupaten Balangan	Persentase Fasilitasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4.929.856.889	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Balangan	Jumlahn Orang / Bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	4.929.856.889	Penyediaan Gaji dan Tunjang	Kabupaten Balangan	Jumlahn Orang / Bulan Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	43 Orang/ Bulan	4.929.856.889	
	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kabupaten Balangan	Persentase Fasilitasi Administrasi kepegawaian dan perangkat Daerah yang terlayani	100%	699.387.900	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	Kabupaten Balangan	Persentase Fasilitasi Administrasi kepegawaian dan perangkat Daerah yang terlayani	100%	699.387.900	
	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Kabupaten Balangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	40 Orang	573.797.900	Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan Fungsi	Kabupaten Balangan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Yang Mengikuti Pendidikan Dan Pelatihan	40 Orang	573.797.900	
	Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20 Orang	125.590.000	Bimbingan Tekhnis Implementasi perundang undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimtek Implementasi Peraturan Perundang Undangan	20 Orang	125.590.000	

	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	Kabupaten Balangan	Persentase dan fasilitasi umum Perangkat Daerah	100%	339.387.700	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>	Kabupaten Balangan	Persentase dan fasilitasi umum Perangkat Daerah	100%	339.387.700
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	1 Paket	53.600.600	Penyediaan Bahan Logistik K	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang di Sediakan	1 Paket	53.600.600
	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	1 Paket	19.547.100	Pengadaan barang cetakan dan penggandaan	Kabupaten Balangan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan Yang di Sediakan	1 Paket	19.547.100
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	1 Dokumen	8.640.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan peraturan Perundang Undangan yang di Sediakan	1 Dokumen	8.640.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	257.600.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	257.600.000
	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH</b>	Kabupaten Balangan	Persentase Fasilitas Pengadaan barang milik Daerah	100%	8.466.000	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN DEARAH</b>	Kabupaten Balangan	Persentase Fasilitas Pengadaan barang milik Daerah	100%	8.466.000
	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Lakukan Pemeliharaan	3 Unit	8.466.000	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Kabupaten Balangan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di Lakukan Pemeliharaan	3 Unit	8.466.000
	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kabupaten Balangan	Persentase dan fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	100%	109.819.800	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kabupaten Balangan	Persentase dan fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	100%	109.819.800
	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air ,dan Listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	3 Laporan	109.819.800	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air ,dan Listrik	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang di Sediakan	3 Laporan	109.819.800
	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kabupaten Balangan	Persentase dan fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	100%	257.000.000	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	Kabupaten Balangan	Persentase dan fasilitasi pemeliharaan barang milik Daerah	100%	257.000.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	5 Unit	251.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Di Bayarkan Pajaknya	5 Unit	251.300.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Kabupaten Balangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	5 Unit	5.700.000	Pemeliharaan Peralatan dan M	Kabupaten Balangan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang di Pelihara	5 Unit	5.700.000

	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kabupaten Balangan			4.064.825.000	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kabupaten Balangan			7.244.230.500	
	<b>PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA</b>	Kabupaten Balangan	Persentase Penanganan Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang Selesaikan	100%	3.705.365.000	<b>PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DALAM SATU DAERAH / KOTA</b>	Kabupaten Balangan	Persentase Penanganan Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang Selesaikan	100%	6.884.790.500	
	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawasan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Keterliban Umum yang di Cegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	23 Kasus	3.218.246.900	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawasan	Kabupaten Balangan	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman Dan Keterliban Umum yang di Cegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	23 Kasus	3.218.246.900	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Keterliban Umum	1 Dokumen	284.728.500	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen yang memuat hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Keterliban Umum	1 Dokumen	3.464.134.000	Pengamanan Pemilu Serentak 2023
	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokume	202.409.600	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Kabupaten Balangan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Hasil Pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	4 Dokume	202.409.600	
	<b>PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA</b>	Kabupaten Balangan	Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang di selesaikan serta titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan perkada	100%	359.440.000	<b>PENEGAKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN / KOTA DAN PERATURAN BUPATI / WALI KOTA</b>	Kabupaten Balangan	Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang di selesaikan serta titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan perkada	100%	359.440.000	
	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada Kepada Masyarakat atau Kelompok Masyarakat	8 Laporan	56.340.000	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda / Perkada Kepada Masyarakat atau Kelompok Masyarakat	8 Laporan	56.340.000	
	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	1 Laporan	303100000	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Kabupaten Balangan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang di lakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah dan peraturan Bupati / Wali Kota	1 Laporan	303100000	

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan-usulan maupun keluhan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dari masyarakat di peroleh melalui beberapa cara yaitu, penyampaian langsung kepada petugas maupun melalui telepon. Beberapa usulan yang di inginkan oleh masyarakat sebagian besar berharap bahwa adanya peningkatan rasa keamanan dan kenyamanan di lingkungan masyarakat di kabupaten Balangan.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan  
Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

##### 3.1 Telaahan Terhadap Dampak Sosial Ekonomi Masyarakat Terhadap penegakan Perda dan Perkada

Berdasarkan hasil analisa isu strategis daerah sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten balangan tahun 2021-2026, Maka di peroleh kesimpulan permasalahan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban Umum yaitu isu kondusivitas dan Stailitas daerah. Hal ini di dapatkan masalah pokok yaitu merujuk pada isu derajat keamanan, kondisi daerah yang tertib dan demokratis mendukung Sosial Ekonomi dan daya tarik investasi.

Dalam penyelenggaraan Ketenteraman dan ketertiban umum dapat diidentifikasi beberapa dampak sosial masyarakat yaitu Meningkatnya penegakan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, aman serta memiliki kepedulian sosial dan bermartabat. Dapat di lihat dengan menurunnya kejadian insidentil yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, serta optimalisasi peningkatan kapasitas anggota linmas yang terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan meningkatkan penyelesaian pelanggaran perda dan perkada.

Untuk lebih jelasnya mengenai dampak sosial ekonomi dari penegakan perda dan perkada dapat di lihat dalam tabel Berikut :

NO	KEGIATAN	DAMPAK SOSIAL	DAMPAK EKONOMI
1	PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA	Terwujudnya masyarakat yang tertib memiliki kepedulian sosial dan bermartabat	Kondisi daerah yang aman dan tertib serta demokratis mendukung stabilitas ekonomi dan daya tarik investasi masuk ke daerah
2	SOSIALISASI PERDA DAN PERKADA	Kesadaran hukum masyarakat meningkat	
3	PENANGANAN GANGGUAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Pelayanan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum meningkat	

### 3.2 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Dalam permendagri 27 Tahun 2014 dikatakan dalam meningkatkan pelayanan pemeliharaan ketertiban umum ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui :

1. Penegakan peraturan daerah dan peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten / Kota melalui tindakan pre-emptive, preventif non yustisial maupun penindakannya yustisial.
2. Peningkatan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Peningkatan tersebut untuk mewujudkan rasa tentram dan damai masyarakat Balangan dengan meningkatkan kesiagaan anggota Polisi Pamong Praja dalam menanggapi keadaan dilapangan.

Dalam rangka sinkronisasi Program antara Program Nasional dengan Program Daerah, perlu dilakukan telaahan terhadap kebijakan nasional tersebut, oleh karena itu dalam penyusunan Renja Tahun 2022 kami memperhatikan pula prioritas dan program nasional. Adapun program yang akan direncanakan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Menciptakan pemahaman tentang kenyamanan dan keamanan lingkungan kepada masyarakat.
2. Menciptakan keamanan, ketertiban dan ketentraman lingkungan sesuai dengan perundang-undangan bagi masyarakat.
3. Mengikut sertakan aparat Satpol PP dalam berbagai pelatihan dan pendidikan supaya terpenuhi sumber daya aparatur satuan polisi pamong praja yang berkualitas.
4. Meningkatkan kerjasama dalam sosialisasi bersama POLRI, TNI dan instansi terkait

Secara khusus program arah kebijakan program prioritas dan kegiatan SKPD kami tahun 2022 adalah Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Balangan, yakni dengan cara peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan.

### **3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja SKPD**

Tujuan dari disusunnya Rencana Kerja Tahun 2022 adalah berdasarkan evaluasi kerja tahun lalu, dapat disimpulkan bahwa target kinerja secara umum adalah Meningkatnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kabupaten Balangan. Di samping sasaran – sasaran yang yang sudah ditetapkan yaitu mewujudkan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, berwawasan dan berkperibadian, terciptanya tertib administrasi, dan terciptanya tugas operasional secara efektif danefisien.

### **3.4 Program Dan Kegiatan**

Berdasarkan visi dan misi Bupati Balangan priode tahun 2021 - 2026; Menetap kan visi Kabupaten Balangan“MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA” yang memuat 5 (Lima) misi Pemerintah Kabupaten Balangan, Maka yang terkait langsung dengan tugas pokok, fungsi, visi dan misi badan Satuan Polisi Pamong Praja adalah pada poin kelima “Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif”

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Balangan 2021-2026 tersebut, dapat ditempuh melalui 5 (Lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengembangkan Infrastruktur Pedesaan dan Perkotaan
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Balangan Berbasis Pertanian ,Perkebunan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan Masyarakat Balangan
4. Meningkatkan Kualitas dan Layanan birokrasi Pemerintahan Sebagai Abdi Masyarakat dan Abdi Negara Serta penyelenggaraan Pemerintah yang Inovatif
5. Mewujudkan Kehidupan Sosial, Budaya dan Agama serta Pemerintahan yang Harmonis dan Kondusif

Dengan memperhatikan arah pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Balangan pada tahun 2022, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan merumuskan Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 yang terdiri dari 2 (Dua) Program dan 9 (Sembilan) Kegiatan dan 23 ( Dua Puluh Tiga) sub Kegiatan, adapun program, kegiatan dan Sub Kegiatan Tersebut tersebut sebagai berikut:

## **A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**

### **1. Perencanaan ,Pengggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

- a. Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD
- c. Evaluasi Kinerja perangkat Daerah

### **2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

### **3. Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah**

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
- c. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang–undangan

### **4. Administrasi Umum dan Perangkat Daerah**

- a. Penyediaan Bahan dan Logistik Kantor
- b. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- c. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
- d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

### **5. Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**

- a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung Kantor atau Bangunan lainnya
- b. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

### **6. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan daerah**

- a. Penyediaan jasa Kumonikasi, sumber daya air dan Listrik.

### **7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

## **B. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**

### **1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota**

- a. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan cegah Dini Pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, Pengamanan dan pengawalan
- b. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban

umum

- c. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban Umum

- 2. Kegiatan Penegakan Peraturan daerah Kabupaten / Kota dan peraturan Bupati / wali kota**
  - a. Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / wali Kota
  - b. Pengawasan dan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / wali Kota

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 Dan Prakiraan Maju Tahun 2024									
Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome)/ Kegiatan(output)	Rencana Tahun 2023				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
			Lokasi	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	PAGU		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 05		PEREMINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN TIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT			14.269.470.329	14.269.470.329			15.696.417.362
1 05 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA			7.864.140.329	7.864.140.329			8.650.554.362
1	2.01	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua wilayah pemda	100%	186.606.400	186.606.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	205.267.040
	01	Penyusunan Dukumen Perangkat Daerah	Semua wilayah pemda	2 Dukumen	116.654.400	116.654.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	2 Dukumen	128.319.840
	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua wilayah pemda	1 Laporan	20.671.200	20.671.200	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	22.738.320
	07	Evaluasi dan Kinerja Perangkat Daerah	Semua wilayah pemda	1 Laporan	49.280.800	49.280.800	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	54.208.880
1	2.02	Administrasi keuangan dan Perangkat daerah	Semua wilayah pemda	100%	5.769.424.429	5.769.424.429	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	6.346.366.872
	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Semua wilayah pemda	43 Orang / Bulan	5.769.424.429	5.769.424.429	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	43 Orang / Bulan	6.346.366.872
1	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	semua wilayah pemda	100%	675.064.600	675.064.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	742.571.060
	09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	semua wilayah pemda	20 Orang	605.014.600	605.014.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	20 Orang	665.516.060
	11	Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang undangan	semua wilayah pemda	20 Orang	70.050.000	70.050.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	20 Orang	77.055.000
1	2.06	Administrasi Umum Perangkat daerah	semua wilayah pemda	100%	375.047.700	375.047.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	412.552.470
	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	semua wilayah pemda	12 Paket	53.880.600	53.880.600	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Paket	59.268.660
	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	semua wilayah pemda	12 Paket	19.547.100	19.547.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Paket	21.501.810

			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Bahan Bacaan yang di sediakan	semua wilayahpemda	12 Dolumen	8.580.000	8.580.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Dolumen	9.438.000
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	semua wilayah pemda	12 Laporan	273.040.000	273.040.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	12 Laporan	300.344.000
1		2	07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Fasilitas pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>semua wilayahpemda</b>	<b>'100%</b>	<b>353.767.400</b>	<b>353.767.400</b>	<b>Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>	<b>'100%</b>	<b>389.144.140</b>
			01	Pengadaan Sarana dan Prasarana gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah jenis Sarana Dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan lainnya	semua wilayahpemda	3 unit	353.767.400	353.767.400	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 unit	389.144.140
1		2	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Persentase Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>semua wilayahpemda</b>	<b>'100%</b>	<b>134.814.700</b>	<b>134.814.700</b>	<b>Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil</b>	<b>'100%</b>	<b>148.296.170</b>
			02	Penyediaan Jasa Kmunikasi, sumberdaya air dan Listrik	Jumlah Jasa Kmunikasi ,Air dan Listrik yang di bayarkan	semua wilayahpemda	3 Laporan	134.814.700	134.814.700	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	3 Laporan	148.296.170
1		2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Persentase Fasilitas Pemeliharaan Barang Milik daerah	semua wilayahpemda	100%	387.415.100	387.415.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	426.156.610
			01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Operasional Iapanagan, Dan Kendaraan Dinas Perorangan yang di Pelihara	semua wilayahpemda	45 Unit	372.315.100	372.315.100	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	45 Unit	409.546.610
			06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan Mesin lainnya yang di pelihara	semua wilayahpemda	81 Unit	15.100.000	15.100.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	81 Unit	16.610.000
1	05	02		<b>PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>		<b>semua wilayahpemda</b>	<b>100%</b>	<b>6.045.330.000</b>	<b>6.045.330.000</b>		<b>100%</b>	<b>6.649.863.000</b>
1		2.0	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam satu daerah Kabupaten / Kota	Persentase Penanganan Gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat yang Selesaikan	semua wilayahpemda	100%	5.936.770.000	5.936.770.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	6.530.447.000
			01	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli pengamanan dan Pengawasan	Jumlah Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Yang di Selesaikan	semua wilayahpemda	22 KLasus	5.409.504.000	5.409.504.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	20 Kasus	5.950.454.400
			04	Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Masyarakat yang terlindungi dalam hal ketenteraman dan ketertiban Umum	semua wilayahpemda	1 Dokumen	457.176.000	457.176.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Dokumen	502.893.600
			06	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan	Jumlah Lembaga yang menjadi Mitra dalam pencegahan dan penanganan gangguan	Semua wilayah Pemda	4 Dokumen	70.000.000	70.000.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	4 Dokumen	77.000.000
1		2.0	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Persentase Penanganan Perda dan Perkada yang di selesaikan serta titik lokasi yang bebas pelanggaran Perda dan perkada	semua wilayahpemda	100%	359.440.000	359.440.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	100%	395.384.000
			01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Masyarakat yang memahami tentang perda dan perkada	semua wilayahpemda	8 Laporan	56.340.000	56.340.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	8 Laporan	61.974.000
			02	Pengawasan atas kepatuhan Terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	Jumlah Pelanggaran Perda yang Terpantau melalui Pengawasan Perda dan Perkada	semua wilayahpemda	1 Laporan	412.220.000	412.220.000	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	1 Laporan	453.442.000

**BAB V**  
**PENUTUP**

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2023 di buat dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Kabupaten Balangan dengan mengacu RKPD Kabupaten Balangan Tahun 2023.

Rencana Kerja disusun untuk menggambarkan program dan kegiatan prioritas tahun 2023 merupakan upaya pencapaian tujuan dan sasaran jangka pendek dalam menjalankan urusan wajib pelayanan dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Dalam penyusunan Rencana Kerja tidak terlepas dari bantuan dan dukungan seluruh aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan dalam merumuskan program dan kegiatan tahun 2023

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Balangan Tahun 2022, semoga dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat.

Paringin,                      2022

	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  NOOR ASPARIAH, SP. MP NIP. 19660613 199802 2 003
--	--